



Judul : Anggaran Minim : Perpustakaan Kerja Keras Genjot Minat Baca
Tanggal : Sabtu, 02 September 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Anggaran Minim Perpusnas Kerja Keras Genjot Minat Baca

SENAYAN menilai anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2024 sebesar Rp 721,19 miliar kurang memadai. Pasalnya, Indonesia dengan kondisi wilayah sangat luas, jumlah penduduknya banyak, butuh layanan perpustakaan untuk meningkatkan literasi masyarakat.

"Saya terima kasih paparannya begitu detail kita dapatkan. Cuma memang anggarannya masih memprihatinkan," kata anggota Komisi X DPR Djohan Arfin Husain dalam rapat kerja Komisi X bersama Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (31/8).

"Jadi tidak ada komentar dan usul saya, mungkin dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) berikutnya tidak perlu dibahas lagi, tinggal ketok palu saja. Karena ini sudah detail," tambahnya.

Anggota Komisi X DPR Lisdia Hendrajoni mengapresiasi kerja-kerja yang telah ditorehkan Perpusnas dalam mendorong peningkatan minat baca di masyarakat. Walau dengan anggaran terbatas, Perpusnas terus bergerak dan berjuang, sehingga hasilnya di daerah makin banyak perpustakaan bertumbuh.

"Kita berharap sosialisasi atau budaya untuk literasi ini terus kita sosialisasikan dan mendorong Perpusnas berkolaborasi dengan instansi Pemerintah untuk terus budayakan membaca ini," katanya.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi X DPR Vanda Sarundajang. Pihaknya juga turut memberikan apresiasi kepada Perpusnas. Dengan anggaran yang begitu minim, Perpusnas terus semangat untuk membuat program-program yang bermanfaat besar bagi pengembangan budaya literasi.

Hanya saja, anggaran yang sangat terbatas ini membuat perpustakaan di daerah pemilihannya, di Sulawesi Utara, ikut kena imbas.

"Kalau kita keliling ke 15 kabupaten/kota yang ada di Sulut, memang perpustakaan daerah bahkan yang berada di ibu kota provinsi saja sangat miris keadaannya," ujarnya.

Untuk itu, dia meminta ada

perhatian dari Perpusnas atas situasi tersebut. Perpusnas setidaknya bisa mengalokasikan anggaran untuk pengadaan perpustakaan keliling. Apalagi Sulut ini termasuk daerah kepulauan dan beberapa di antaranya merupakan daerah 3T.

Untuk mengangkat minat baca generasi muda, lanjutnya, Perpusnas bisa mengajak Pemerintah daerah (Pemda), gubernur, bupati, walikota, camat, kelurahan.

"Mungkin secara berkala, Perpusnas mengirimkan surat imbauan kepada Pemda. Karena di dapil saya belum ada perhatian dari Pemda terhadap perpustakaan," harapnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengingatkan sejumlah catatan terkait dengan alokasi anggaran Perpusnas tahun anggaran 2024. Di antaranya, mendorong agar program prioritas mendapatkan alokasi anggaran memadai. Program kegiatan yang dirancang juga harus memiliki dampak langsung kepada masyarakat.

"Dalam rangka mendukung program literasi, Komisi X mendorong Perpusnas melakukan kerja sama dengan Mendikburistek dan kementerian lain yang terkait literasi," tegasnya.

Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando mengatakan, berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor 626, Perpusnas mendapatkan alokasi rencana anggaran tahun 2024 sebesar Rp 721,19 miliar. Adapun pembagian alokasi ini terdistribusi antara lain, berdasarkan fungsi. Yakni fungsi pendidikan sebesar Rp 463,74 miliar, setara dengan 64,30 persen. Kemudian pelayanan umum sebesar Rp 257,454 miliar atau 35,70 persen.

Berikutnya, berdasarkan sumber dana, yakni rupiah murni sebesar Rp 720,70 miliar, kemudian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 487,4 juta.

Berdasarkan program prioritas, yakni skala prioritas nasional sebesar Rp 379,84 miliar, atau setara 52,67 persen, dan non prioritas nasional Rp 341,35 miliar atau setara dengan 47,33 persen. ■ KAL